



**ANALISIS KELEMBAGAAN
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT-MANDIRI
PERKOTAAN (PNPM-MP) DI KOTA SEMARANG**

**PENELITIAN DISERTASI
(DISIAPKAN UNTUK UJIAN TERBUKA)**

**Oleh : Munawar Noor
NIM : 14020110500007**

**PROGRAM STUDI DOKTOR ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2014

**ANALISIS KELEMBAGAAN
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI
PERKOTAAN (PNPM-MP) DI KOTA SEMARANG**

Oleh :

Nama : Munawar Noor

NIM : 14020110500007

Telah Disetujui , oleh :

Promotor :

Prof. Drs. Y. Warella, MPA, PhD

Co-Promotor 1

Co-Promotor 2

Prof. Dr. Dra. Sri Suwitri, MSi.

Dr. Hardi Warsono, MTP

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Munawar Noor

NIM : 14020110500007

Judul Disertasi : Analisis Kelembagaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) di Kota Semarang.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan Disertasi ini secara keseluruhan saya lakukan sendiri berdasarkan data hasil penelitian. Apabila terdapat karya orang lain saya cantumkan sumbernya dengan jelas.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Diponegoro.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Semarang, Maret 2014

Penulis,

Munawar Noor

NIM : 14020110500007

HALAMAN PERUNTUKAN

Alhamdulillah robbil alamin

Teriring sujud syukur yang dalam kehadiran Illahi Robbi

Kupersembahkan karya ini kepada :

Istriku Hj. Retno Rudiantun, S.Sos. (Almarhumah)

Anak-anakku : Bayu Putranadya, Riesky Arpriasmarany,

Mastian Nugrahantyo

Menantu dan cucu : Dina Rahayuning Pangestuti,

Irfan Niyaz Pratama, Irhas Mirsza Mahardika

Muhamad Ali, Ruliff Alfian Ali, Lutfi Ramadan Ali

Mana yang harus dijalani

Pilihan salah terkadang membawa kita pada jalan yang benar

Pilihan yang benar bukan jalan menuju pengalaman

Saat di hadapan pilihan, pilih untuk menjalani.....

GoAhead.People.com

RINGKASAN

Mekanisme kelembagaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) melibatkan unsur pemerintah, dunia usaha, masyarakat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi. Melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat miskin, diharapkan dapat ditumbuh kembangkan keterlibatan masyarakat untuk menjadi subyek bukan obyek dalam upaya pembangunan.

Masalah dalam penelitian ini adalah : 1). Bagaimana kelembagaan program PNPM-MP di Kota Semarang, 2). Bagaimana sinergitas kelembagaan PNPM-MP di Kota Semarang, 3) Bagaimana model kelembagaan PNPM-MP di Kota Semarang.

Fokus penelitian ini kelembagaan PNPM-MP pada tingkat kelurahan dan basis (BKM/KSM) yang dikaji dari aspek : 1). Pengelolaan BKM, 2). Sinergitas antar lembaga, 3). Usulan model kelembagaan PNPM-MP. Hasil penelitian tentang analisis kelembagaan PNPM-MP diharapkan dapat memberikan kontribusi (1). Teoritis, bahwa dalam konteks disiplin administrasi negara berfungsi sebagai instrumen publik untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat, sehingga diharapkan terjadi perubahan polarisasi dalam hal : orientasi birokrasi bergeser dari yang kuat ke yang kurang berdaya, birokrasi harus membangun partisipasi, birokrasi bergeser dari mengendalikan ke mengarahkan, birokrasi harus mengembangkan keterbukaan. (2). Praktis, bahwa hasil penelitian tentang analisis kelembagaan PNPM-MP diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penentu kebijakan dalam perspektif yang lebih luas berdasarkan usulan model kelembagaan dari temuan lapangan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologis dengan menggunakan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi, FGD, dokumentasi.

Lokasi penelitian meliputi wilayah Kota Semarang (16 Kecamatan, 177 Kelurahan) dengan 2 BKM, 10 KSM sebagai unit analisis dari 2 Kecamatan dan 2 Kelurahan yang dipilih secara *purposive* (sengaja).

Kesimpulan, Rekomendasi, Implikasi, Keterbatasan Penelitian :

1. KESIMPULAN.

1.1. Kelembagaan PNPM-MP Di Kota Semarang

- a. Kelembagaan PNPM-MP pada tingkat kelurahan dan basis (BKM/KSM) dalam kegiatannya masih bergerak pada tataran horizontal dan lemah pada tataran vertikal karena lemahnya pengendalian;
- b. Keberadaan kelembagaan BKM/KSM dimasyarakat dipandang sebagai kebutuhan program dalam siklus BLM maupun siklus PM, belum melembaga diukur dari *Key Performance Indicator (KPI)* dan *Project Appriasal Document (PAD)*, serta pelembagaan masyarakat berbasis partisipasi.
- c. Kelembagaan BKM pada tingkatan kelurahan dalam melakukan mekanisme pengendalian KSM di wilayahnya bervariasi sesuai karakteristik wilayah dan masyarakatnya dan terkesan normatif sesuai dengan prosedur baku berjalannya program secara benar terhindar dari kebocoran dana BLM.

1.2. Sinergitas Kelembagaan PNPM-MP

- a. Integrasi program kelembagaan PNPM-MP yang terwujud dalam perencanaan pembangunan dan terdokumentasi dalam aturan perundangan di tingkat kelurahan, kecamatan, kota (Musrenbang, aspirasi, reses, kontingensi, dll), lebih banyak merupakan usulan para elit kelurahan, kecamatan dan kota, belum secara optimal melibatkan masyarakat.
- b. Kelembagaan program di masyarakat untuk menumbuh kembangkan semangat kelembagaan dalam kelembagaan

PNPM-MP belum mencerminkan terbangunnya koordinasi dan integrasi dengan lembaga pemerintah (TKPK-D), sehingga proses yang terjadi hanya sebatas sejauhmana masyarakat dapat mengelola dan mengendalikan bantuan secara benar.

- c. Koordinasi antar program (pusat-daerah) untuk melakukan akselerasi program terbatas pada pola-pola komunikasi yang dibangun antar pejabat, sehingga program belum menyentuh kepentingan masyarakat miskin.
- d. Kemitraan dan kerjasama kelembagaan (pemerintah, dunia usaha, masyarakat) selama ini terkesan menciptakan suasana hierarkis dan birokratis, belum menyentuh target capaian program.

2. REKOMENDASI

Untuk melembagakan BKM/KSM pada tingkat Kelurahan pada tataran horizontal dan vertikal diperlukan sinergi antar lembaga (pemerintah-masyarakat) melalui jalur pengendalian pada tingkat Kelurahan, Kecamatan, Konsultan, Pemerintah Kota, dengan lebih mengintensifkan kegiatan :

1. Integrasi program akan mampu memperkuat strategi intervensi PNPM-MP dengan cara memberi kesempatan masyarakat berpartisipasi aktif di setiap tahapan siklus (siklus BLM, siklus PM), sehingga terjadi penguatan kelembagaan pada tingkat Kelurahan dan basis (BKM/KSM).
2. Kelembagaan program di masyarakat melalui mekanisme perencanaan yang terintegrasi dengan melibatkan lembaga Pemerintah, akan menjadikan program yang digagas oleh PNPM-MP diarahkan pada kegiatan yang menyentuh kepentingan masyarakat.
3. Koordinasi antar program (Pusat-Daerah) hendaknya dijadikan proses saling asah, asih dan asuh dan merupakan media

pembelajaran bersama yang pada gilirannya akan dihasilkan rekomendasi-rekomendasi positif bagi kelembagaan PNPM-MP.

4. Kemitraan dan kerjasama kelembagaan (Pemerintah, Dunia Usaha, Masyarakat) hendaknya diwujudkan dalam *channeling* program dengan lembaga-lembaga lain untuk meningkatkan posisi tawar BKM sebagai motor penggerak pada tingkat Kelurahan.

3. IMPLIKASI HASIL PENELITIAN

1. Implikasi Teoritis

Usulan model kelembagaan PNPM-MP di Kota Semarang diharapkan mampu melahirkan inisiatif terbangunnya kelembagaan masyarakat yang berisi sekelompok orang yang bekerjasama dengan pembagian tugas tertentu untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan, walaupun tujuan peserta kelompok dapat berbeda, tetapi dalam organisasi menjadi satu kesatuan.

Dengan demikian kelembagaan lebih menekankan sebagai aturan main di dalam suatu kelompok yang sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi, sosial, politik (North, 1990).

Oleh karena itu dalam pengembangan kelembagaan BKM lebih ditekankan pada aturan main (*the rules*) dan kegiatan kolektif (*collective action*) untuk mewujudkan kepentingan bersama, sehingga seluruh masalah yang dihadapi masyarakat dapat diselesaikan dengan cepat dan fleksibel.

Dalam membangun sebuah lembaga ada lima variabel didalamnya, yaitu : (1). kepemimpinan, mengacu pada kelompok orang yang aktif berkecimpung perumusan doktrin dan program lembaga, (2). Doktrin, sebagai spesifikasi dari nilai, tujuan dan metode operasional, (3). Program, menunjuk pada tindakan tertentu, (4), Sumber daya, masukan berupa keuangan, fisik, manusia, teknologi, (5). Struktur internal, struktur dan proses bekerjanya lembaga (Joseph W Eaton, 1986).

Deseminasi kebijakan perlu dilakukan untuk memperlancar implementasi kelembagaan PNPM-MP meliputi :

- (1) Adanya respek anggota masyarakat terhadap otoritas pemerintah untuk menjelaskan perlunya secara moral mematuhi undang-undang yang dibuat oleh pihak berwenang;
- (2) Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan yang terwujud dalam melaksanakan kebijakan manakala kebijakan dianggap logis;
- (3) Keyakinan bahwa kebijakan dibuat secara sah;
- (4) Awalnya suatu kebijakan dianggap kontroversial, namun dengan berjalannya waktu maka kebijakan tersebut dianggap sebagai sesuatu yang wajar.

Oleh karena itu dalam analisis implementasi sebuah kebijakan dikaji melalui perspektif administrasi publik untuk dapat memahami tekanan kelompok kepentingan dan berbagai faktor lingkungan politis. Sementara itu melalui perspektif ilmu politik untuk memahami dukungan dari pendekatan sistem kehidupan politik (Mazmanian dan Sabatier, 1983).

Landasan berpijak pendekatan pembangunan bukan birokrasi dan program-program serta proyek-proyek yang dirancang dan dikelola secara terpusat, melainkan program serta proyek yang dirancang masyarakat atau komunitas itu sendiri, berdasarkan kebutuhan dan kemampuannya.

Lebih luas dari semuanya dalam konteks kelembagaan PNPM-MP adalah penguasaan atas sumberdaya dan nasib mereka sendiri yang merupakan suatu keberanian untuk berkomitmen di seluruh dunia dengan menempatkan secara langsung tiga tantangan pusat pembangunan: yakni (1). pengurangan kemiskinan, (2). perlindungan kapasitas produksi berdasarkan sumber daya lingkungan, dan (3). pemberdayaan manusia melalui peningkatan partisipasi di dalam proses pembangunan.

2. Implikasi Praktis.

- a. Menumbuhkan kesadaran bahwa mengembangkan kelembagaan PNPM-MP adalah masalah bersama (pemerintah, dunia usaha, masyarakat), membutuhkan kemitraan dan kerjasama kelembagaan;
- b. Menumbuhkan kesadaran akan kebutuhan kelembagaan PNPM-MP bersinergi dengan lembaga-lembaga pemerintah (LMK, LPMK, PJOK, TKPP, TKPK-D);
- c. Menumbuhkan kesadaran bahwa sasaran akhir kelembagaan program PNPM-MP adalah terjadinya transformasi sosial masyarakat dari : Tidak Berdaya→Berdaya→Mandiri→Madani.

4. KETERBATASAN PENELITIAN.

Penelitian Disertasi ini telah diusahakan dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur ilmiah yang direncanakan, namun demikian masih memiliki keterbatasan dalam pelaksanaannya yaitu:

1. Untuk wawancara dengan pengurus BKM di Kelurahan harus membuat kesepakatan waktu (tanggal, jam, tempat) karena rata-rata kantor BKM hanya buka hari Senin-Kamis, jam 09.00-12.00 (tanggal 1 - tanggal 25) dan hanya 1 atau 2 orang sekretariat, sehingga membutuhkan waktu penelitian yang lebih lama (perpanjangan waktu sekitar 2 bulan);
2. Beberapa pengurus yang berhasil ditemui kalau tidak ada Koordinator BKM tidak mau diwawancarai, sehingga harus minta ijin terlebih dahulu;
3. Pekerjaan anggota KSM kebanyakan pedagang di pasar, buruh pabrik, buruh bangunan, pedagang keliling, sopir angkot, petugas parkir, dll yang sulit ditemui untuk wawancara siang hari, harus dilakukan malam hari (kesepakatan) dengan waktu yang terbatas, sehingga penelitian ini butuh waktu lebih lama.
4. Data yang diberikan pada waktu wawancara sering tidak sesuai dengan pengamatan (observasi) yang dilakukan, sehingga perlu

penegasan (pengulangan) pada waktu yang berbeda dengan kesepakatan ulang;

5. Dalam melakukan observasi seringkali dicurigai sebagai LSM yang mencari masalah tentang dana BLM yang dikelola KSM, terutama bagi KSM yang kurang/tidak aktif.

SUMMARY

Institutional mechanisms Independent Urban Community Empowerment National Program (PNPM-MP) involving government, business, communities ranging from planning, implementation, monitoring and evaluation. Through a process of participatory development, critical awareness and self-reliance of the poor, is grown can be expected to be the subject of community involvement in development efforts, and the poor is not an object.

The problem in this study were: 1). How institutional PNPM-MP in the city, 2). How to institutional synergy PNPM-MP in Semarang 3) How does the institutional model of PNPM-MP in Semarang. This study focused on institutional PNPM-MP at the village level and base (BKM / KSM) were studied from the aspects of: 1). BKM Management, 2). Synergy among institutions, 3). Proposed model of institutional PNPM-MP.

The results of research on institutional analysis PNPM-MP is expected to contribute, (1). Theoretically, that in the context of the discipline of public administration serves as an instrument for creating public welfare of the community, so expect a change in polarization in terms of: bureaucratic orientation shifted from the strong to the less powerful, the bureaucracy must build participation, bureaucratic shift of control to steer, the bureaucracy must develop openness. (2). Practically, that the results of research on institutional analysis PNPM-MP is expected to contribute to the decision-makers in a broader perspective based on the proposed institutional model of field findings.

This study used a phenomenological qualitative approach using the method of collecting data through interviews, observation, focus group discussions, and documentation.

Location of this study include the city of Semarang (16 Districts, 177 Sub-District) with 2 BKM, 10 KSM as the unit of analysis of 2 (two) Districts and 2 (two) Sub Districts and purposively selected (intentionally).

Conclusions, Recommendations, Implications, Limitations of Research

1. CONCLUSIONS

1.1. PNPM-MP Institutional in Semarang

- a. Institutional of PNPM-MP at the village level and base (BKM / SHG) in the level of activity is still moving in horizontally line and it is vertically weak due to the weak level of control;
- b. The existence of institutional BKM / CBOs in the community is seen as a necessity in the program cycle and cycle of BLM/ PM, not yet institutionalized measured by Key Performance Indicators (KPI) and Appriasal Project Document (PAD), as well as the institutionalization of community-based participation.
- c. Institutional of BKM at village level in performing KSM control mechanism in the region varies according to the characteristics of the region and the community and was impressed normative that the program was run properly according to standard procedures in order to avoid the leakage of BLM funds.

1.2. Institutional of PNPM-MP Synergy in Semarang City

- a. Integration of PNPM-MP institutional programs embodied in development planning, and documented in the rules legislation at the village, district, town (musrenbang, aspirations, recess, contingency, etc.), was more a suggestion of the elite village, district and city, not optimally engage in the community.
- b. Institutional programs in the community to cultivate the spirit of institutions in poverty reduction has not been reflected in the establishment of coordination and integration of government agencies (TKPK-D), so that the process occurs

only limited to the extent that communities can manage and control the proper assistance.

- c. Coordination between programs (central and regional) to accelerate the program is limited to the patterns established communication between officials, so that the program has not touched the interests of the poor.
- d. Partnership and cooperation institutions (government, business, community) had been impressed create an atmosphere of hierarchical and bureaucratic, not touching the target program performance.

2. RECOMMENDATIONS

To institutionalize the BKM / SHGs at Village level, at the level required horizontally and vertically synergies between institutions (government-community) through the control at the level of the Village, District, Consultant, City Government, with further intensify activities as follows:

1. Integration program will be able to strengthen PNPM-MP intervention strategies by giving people the opportunity to actively participate in each phase of the cycle (BLM cycle, PM cycle), resulting in the strengthening of the Village and the base level (BKM / KSM).
2. Institutional programs in communities through integrated planning mechanism involving government agencies, will make the program initiated by the PNPM-MP is directed at activities that touch the interests of the community.
3. Coordination between programs (Central-Region) should be a process of mutual teaser, foster care and compassion and a shared learning media which in turn will produce positive recommendations for PNPM-MP institutional.
4. Partnership and cooperation institutions (Government, Business, Society) should be realized in channeling program with other

agencies to improve the bargaining position of BKM as a driving force at the Village level.

3. IMPLICATIONS OF RESEARCH FINDINGS

1. Theoretical Implications

Proposed model of institutional PNPM-MP in Semarang is expected to create an initiative establishment of community institutions that contain a group of people who cooperate with the division of specific tasks to achieve a desired goal, although the purpose of the group participants may be different, but the organization into a single unit. Thus the institutional more emphasis on rules within a group that is heavily influenced by economic factors, social, political (North, 1990).

Therefore, in the institutional development of the BKM more emphasis on the rules of the game (the rules) and collective activities to achieve common interests, so that all the problems facing society can be resolved quickly and flexibly.

Based on the theory above, in building an organization in which there are five variables, namely : (1) Leadership, refers to a group of people who actively engaged the formulation of doctrine and agency programs, (2) Doctrine, as the specification of the values, goals and methods of operation, (3) Program, refers to a specific action, (4) Resources, input in the form of financial, physical, human, technological, (5) internal structure, the structure and operation of the institution (Joseph W Eaton, 1986).

Dissemination of policies needs to be done to facilitate the implementation of PNPM-MP institutions include:

- (1) The presence of members of the public to respect the authority of the government to explain the moral necessity of complying with the laws made by the authorities;

- (2) The existence of consciousness to accept the policy embodied in implementing the policy when the policy is considered logical;
- (3) The belief that the policy was made legally;
- (4) Initially considered a controversial policy, but with the passage of time the policy is regarded as normal.

Therefore, the implementation of a policy analysis is examined through the perspective of public administration to be able to understand the pressures of interest groups and political environmental factors. While it through the perspective of political science approach to understanding the support from the political life system (Mazmanian and Sabatier, 1983).

Stepping stone approach to development and not bureaucratic, programs and projects are designed and managed centrally, but programs and projects designed by community itself, based on the needs and capabilities.

More broadly institutional context of all the PNPM-MP is control over their own resources and destiny which is the courage to commit to a worldwide directly by placing three central challenges of development: namely (1). poverty reduction, (2). production capacity based protection of environmental resources, and (3). human empowerment through increased participation in the development process.

2. Implications of Practical

- a. Raise awareness that institutional develop PNPM-MP is a common problem (government, business, community), requires partnerships and institutional cooperation;
- b. Raise awareness of PNPM-MP needs to sinergize with the government institutions such as LMK. LPMK, PJOK, TKPP, TKPK-D;

- c. Raise awareness of Institutional of PNPM-MP's final objective is a community social transformation from the Poor → Helpless Community → Independent Community → Civil Society

4. RESEARCH LIMITATION

This dissertation research has been conducted in accordance with planned scientific procedures, nevertheless there were some limitations in this study as follows.

1. Before interviewing BKM Committee, it should make a time table dealing (date, hours, place) because BKM office opens on Monday-Thursday at 09.00-12.00 (date of 1-25 every month) and only 1 (one) or 2 (two) person of the committee could be interviewed. Thus the study must be conducted longer than it was planned (extension to 2 (two) months).
2. Some board of BKM who could be met they did not be wanted to interview when BKM Coordinator was absence. They wanted to be interviewed if the Coordinator gave a permission to do so.
3. KSM members' occupation, mostly traders at nearby market, factory blue-color, driver of public transportation, parking jobs and others. The researcher should have extra efforts to meet them to be interviewed in working day, so that it is necessary to make a dealing-time with them to meet for interviewing at night. Consequently, the study took time longer than it was expected.
4. Data that have been collected from interviewing always be different from observation. Thus in order to overcome this difference , it is necessary to repeat the interview in another time by appointment. Another problem is the reseacher was be suspected by community that they thought he was as LSM member who usually makes trouble.
5. When doing observation. The LSM member always ask BLM fund (Direct Aids for Community) that is managed by KSM, especially KSM that is less acively in managing the fund.

ABSTRAK

Judul : Analisis Kelembagaan PNPM Mandiri Perkotaan (PNPM-MP)
Di Kota Semarang.
Oleh : Munawar Noor, NIM : 14020110500007

Kelembagaan PNPM-MP pada tingkat kelurahan dan basis (BKM/KSM) menjadi motor penggerak dan menempatkan masyarakat sebagai subyek dalam pembangunan di wilayahnya. Melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat, diharapkan dapat ditumbuh kembangkan keterlibatan masyarakat untuk menjadi subyek bukan obyek dalam upaya pembangunan kelembagaan. Masalah dalam penelitian ini adalah : 1). Bagaimana kelembagaan PNPM-MP di Kota Semarang, 2). Bagaimana sinergitas kelembagaan PNPM-MP di Kota Semarang, 3). Bagaimana usulan model kelembagaan PNPM-MP di Kota Semarang. Fokus penelitian ini adalah 1). Kelembagaan BKM (Gambaran umum BKM, Siklus PNPM-MP, Pengendalian KSM), 2. Sinergitas Kelembagaan PNPM-MP (Integrasi program, Kelembagaan program di masyarakat, Koordinasi antar program (pusat-daerah), Kemitraan dan kerjasama kelembagaan (pemerintah, dunia usaha, masyarakat). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologis dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi, FGD, dokumentasi. Lokasi penelitian meliputi 2 Kecamatan, 2 Kelurahan dengan 2 BKM, 10 KSM sebagai unit analisis yang dipilih secara *purposive* (sengaja). Kesimpulan hasil penelitian : Kelembagaan PNPM-MP pada tingkat kelurahan dan basis (BKM/KSM) masih dipandang masyarakat sebagai kebutuhan program, belum melembaga baik pada tataran horizontal maupun vertikal, sehingga kurang optimal. Rekomendasi : Untuk membangun kelembagaan dan sinergitas kelembagaan PNPM-MP diperlukan jalur kendali antar lembaga dari tingkat Kelurahan, Kecamatan, Konsultan, Pemerintah Kota.

Kata Kunci : Kelembagaan, Sinergitas, keterlibatan masyarakat, Lembaga masyarakat (BKM/KSM).

ABSTRACT

Title : Institutional Analysis of Urban PNPM (PNPM-MP) in Semarang
By : Munawar Noor, NIM : 14020110500007

Institutional PNPM-MP at the village level and base (BKM / KSM) become the motor and put in the community as a subject in its development territory. Through a process of participatory development, critical awareness and self-reliance, community involvement is grown, it can be expected the community to be the subject of, and it is not an object in the institutional development efforts. The problem in this study were: 1). How institutional PNPM-MP in the city, 2). How institutional synergy PNPM-MP in the city, 3). How the proposed institutional model PNPM-MP in Semarang. The focus of this study is 1). Institutional BKM (BKM overview, Cycle PNPM-MP, Control KSM), 2 Institutional Synergy PNPM-MP (Integration programs, institutional programs in the community, coordination between programs (center-periphery). Partnership and cooperation institutions (government, business, community). This study used a qualitative approach which is a phenomenological with method of data collection through interviews, observation, focus group discussions, documentation. Location of the study includes 2 Districts, 2 Villages with 2 BKMs, 10 KSMs as the unit of analysis were selected purposively (intentionally). Conclusion of the study: Institutional PNPM-MP at the village level and base (BKM / KSM) is still regarded as a community program needs, not institutionalized well on both horizontally and vertically, so that the Institutional is less than optimal. Recommendation: To build institutional and institutional synergy PNPM-MP, it is required control lines between institutions of the level of the Village, District, Consultant, City Government.

Keywords: Institutional, Synergy, community involvement, public Institutions (BKM / KSM)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya kami dapat menyelesaikan laporan penelitian untuk Disertasi dengan judul “Analisis Kelembagaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) Di Kota Semarang” sebagai persyaratan menyelesaikan Program Doktor Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.

Penelitian ini berangkat dari fenomena bahwa kelembagaan PNPM-MP pada tingkat kelurahan dan basis (BKM/KSM) belum berkembang sesuai yang diharapkan program.

Lahirnya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (khususnya untuk masyarakat Perkotaan) atau PNPM-MP dengan membangun BKM/KSM yang berbasis pemberdayaan masyarakat menjadi sangat fenomenal sejak tahun 2007.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk menelitinya dan ingin mengetahui bagaimana kelembagaan PNPM-MP di Kota Semarang, dan alhamdulillah berkat bantuan dari berbagai pihak dan campur tangan Tuhan dengan susah payah kami dapat menyelesaikannya.

Pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan hormat dan terima kasih sedalam-dalamnya kepada :

1. Prof. Sudharto P. Hadi, MES, PhD sebagai Rektor / Ketua Senat Universitas Diponegoro dengan seluruh civitas akademika.
2. Prof. Drs. Y. Warella, MPA, PhD, selaku Promotor yang dengan sabar dan cermat memberikan bimbingan dalam menyusun Disertasi ini
3. Prof. Dr. Dra. Sri Suwitri, MSi, dan Dr. Hardi Warsono, MTP selaku Co-Promotor I dan Co-Promotor II yang dengan sabar dan cermat memberikan bimbingan dalam menyusun Disertasi ini.
4. Seluruh penguji Disertasi yang dengan penuh kesabaran memberikan masukan dan komentar bagi perbaikan Disertasi.
5. Bapak HM Soekirdi, Koordinator BKM Bojong Salaman, Kelurahan Bojong Salaman, Kecamatan Semarang Barat,

6. Bapak Sugiyono, Koordinator BKM Manunggal Sejahtera, Kelurahan Tandang, Kecamatan Tembalang,
7. Sahabat dan teman mahasiswa Doktor Administrasi Publik Universitas Diponegoro Angkatan I
8. Seluruh staf administrasi Program Doktor Administrasi Publik Universitas Diponegoro yang telah membantu kami selama menempuh pendidikan pada program tersebut.
9. Tim Koordinasi Pengendali Program (Bapermas & KB), Tim Koordinator Kota, Tim Konsultan, Tim Fasilitator, Forum BKM/KSM yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu karena terlalu banyak, semoga Tuhan membalas ketulusan Bapak/Ibu dalam membantu saya.
10. Kepada semua pihak yang membantu penyelesaian penelitian disertasi ini di lokasi penelitian.

Penelitian untuk disertasi ini masih banyak kekurangan terlebih apabila diharapkan dapat memenuhi harapan semua pihak, oleh karena itu kami mengharapkan agar disertasi ini memberikan manfaat bagi Pemerintah Kota Semarang terkait dengan kelembagaan PNPM-MP dan menjadi inspirasi bagi penelitian berikutnya.

Akhirnya kepada semua pihak kami mohon maaf sedalam-dalamnya diiringi doa semoga semua pihak mendapatkan balasan dari Tuhan dan diberkahi keselamatan, kesehatan dan rejeki yang barokah....amin...

Semarang, 2014

Hormat,

Munawar Noor.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PERUNTUKAN	iv
RINGKASAN	v
SUMMARY	xii
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
KATA PENGANTAR	xx
DAFTAR ISI	xxii
DAFTAR TABEL	xxix
DAFTAR GAMBAR	xxxii
DAFTAR ISTILAH/SINGKATAN.....	xxxii
DAFTAR LAMPIRAN	xlii
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Rumusan Masalah Penelitian	16
1.3. Tujuan Penelitian	17
1.4. Kontribusi dan Manfaat Penelitian	18
1.4.1. Kontribusi Akademis	18
1.4.2. Kontribusi Praktis	19

BAB II : KAJIAN TEORI

2.1. Penelitian Terdahulu	20
2.2. Lingkup Administrasi Publik.....	34
2.2.1. Teori dan Proses Kebijakan Publik	40
2.2.2. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) sebagai kebijakan	42
2.2.3. Perspektif Implementasi Kebijakan	45
2.3. Teori Kelembagaan	49
2.3.1. Sifat Dasar Kelembagaan	58
2.3.2. Konsep dan Fungsi Kelembagaan	60
2.3.3. Peran Kelembagaan	63
2.3.4. Komponen Kelembagaan	65
2.4. Kelembagaan PNPM-MP	69
2.4.1. Prinsip Pengembangan Kelembagaan	69
2.4.2. Sinergitas Kelembagaan PNPM-MP	74
2.5. Kerangka Pikir Teori	81

BAB III : METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian	84
3.2. Fokus Penelitian.....	84
3.3. Konsep dan Fenomena Penelitian	85
3.4. Penetapan Lokasi dan Situs Penelitian	86
3.5. Sumber dan Jenis Data	87
a. Sumber Data	87

b. Jenis Data	89
c. Proses Pengumpulan Data	90
d. Analisis Data	92
e. Keabsahan Data	95
3.6. Asumsi dan Kerangka Penelitian	97

**BAB IV : GAMBARAN UMUM WILAYAH DAN KELEMBAGAAN
PNPM-MP DI KOTA SEMARANG**

4.1. Profil Pemerintah Kota Semarang	100
4.2. Pengembangan Sistem Pusat Pelayanan	101
4.3. Profil Kependudukan Kota Semarang	103
4.3.1. Pembagian Wilayah.....	104
4.3.2. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk.....	105
4.3.3. Persebaran dan Kepadatan penduduk.....	108
4.4. Profil Kecamatan Lokasi Penelitian	115
4.4.1. Kecamatan Semarang Barat	115
4.4.2. Kecamatan Tembalang	118
4.5. Perkembangan BKM/KSM di Kota Semarang	119
4.5.1. Kriteria BKM di Kota Semarang.....	119
4.5.2. Jumlah KSM per Kecamatan	121
4.5.3. BKM dan KSM di lokasi penelitian	121
4.5.4. Kegiatan BKM dan KSM	122
4.5.5. Rumah Tangga Miskin di Lokasi Penelitian	123
4.6. Pelaksanaan Kelembagaan PNPM-MP Di Kota Semarang.....	125

4.7. Existing Kelembagaan PNPM-MP Di Kota Semarang..	150
a. Mekanisme Pelaksanaan Program	157
b. Prioritas Program	160

BAB V : KELEMBAGAAN PNPM-MP DI KOTA SEMARANG

5.1. Lembaga Pelaksana PNPM-MP di Kota Semarang	173
1. Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM).....	173
1.1. BKM Manunggal Sejahtera, Kelurahan Tandang Kecamatan Tembalang	173
a. Profil BKM Manunggal Sejahtera	173
a.1. Rembug Warga Tahunan (RWT) BKM Manunggal Sejahtera	178
a.2. Rencana Pendapatan dan Anggaran BKM Manunggal Sejahtera, Tahun 2014	186
a.3. Tanggung Jawab BKM Manunggal Sejahtera pada UP dan KSM	189
a.4. Kendala BKM Manunggal Sejahtera	194
a.5. Tantangan BKM Manunggal Sejahtera	195
a.6. Peluang yang dimiliki BKM Manunggal Sejahtera	196
a.7. Struktur Organisasi BKM Manunggal Sejahtera	197

a.8. Program Kerja BKM Manunggal Sejahtera Tahun 2014	200
b. Pelaksanaan Siklus Kelembagaan PNPM- MP pada BKM Manunggal Sejahtera	202
b.1. Forum Refleksi Kemiskinan (FRK)	202
b.2. Forum Pemetaan Swadaya (FPS)	204
b.3. Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat	206
b.4. Penyusunan Perencanaan Jangka Menengah Program Kelembagaan PNPM-MP (PJM Pronangkis).....	206
c. Mekanisme Pengendalian KSM	208
1.2. BKM Bojongsalaman, Kelurahan Bojongsalaman Kecamatan Semarang Barat	211
a. Profil BKM Bojongsalaman, Kelurahan Bojongsalaman Kecamatan Semarang Barat.....	211
a.1. Visi dan Misi BKM Bojong Salaman .	213
a.2. Rembug Warga Tahunan (RWT) BKM Bojongsalaman	214
a.3. Pelaksanaan Kegiatan BKM Bojong Salaman	217
a.4. Kendala dan Tantangan BKM Bojong Salaman	219

a.5. Program Kerja BKM Bojong Salaman Tahun 2014	221
a.6. Struktur Organisasi BKM Bojong Salaman	223
b. Pelaksanaan Siklus Kelembagaan PNPM- MP pada BKM Bojong Salaman	225
b.1. Rembug Kesiapan Masyarakat (RKM).....	25
b.2. Refleksi Kemiskinan (RK)	226
b.3. Pemetaan Swadaya (PS).....	226
b.4. Rembug PJM Pronangkis	227
b.5. Pembentukan KSM	228
c. Mekanisme Pengendalian KSM	229
2. Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).....	230
2.1. KSM Binaan BKM Manunggal Sejahtera, Kelurahan Tandang	231
2.2. KSM Binaan BKM Bojong Salaman, Kelurahan Bojong Salaman, Kecamatan Semarang Barat	236
5.2. Sinergitas Kelembagaan PNPM-MP di Kota Semarang	241
a. Integrasi Program	243
b. Kelembagaan Program di Masyarakat	246
c. Koordinasi Antar Program (Pusat-Daerah)	251

d. Kemitraan dan Kerjasama Kelembagaan (Pemerintah, Dunia Usaha, Masyarakat)	256
---	-----

BAB VI. ANALISIS

6.1. Analisis Kelembagaan PNPM-MP Di Kota Semarang ...	266
6.2. Analisis Sinergitas Kelembagaan PNPM-MP Di Kota Semarang	275
a. Integrasi program	276
b. Kelembagaan program di masyarakat.....	281
c. Koordinasi antar program (pusat-daerah)	291
d. Kemitraan dan kerjasama kelembagaan	298
6.3. Model Usulan Kelembagaan PNPM-MP Di Kota Semarang.....	307

BAB VII. PENUTUP

7.1. Kesimpulan.....	321
7.2. Rekomendasi.....	323
7.3. Implikasi Hasil Penelitian	325
1. Implikasi Teoritis.....	325
2. Implikasi Praktis	328
7.4. Keterbatasan Penelitian	332

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel II.1.	Relevansi dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian yang dilakukan untuk Disertasi	30
Tabel III.1.	Rincian Konsep dan Gejala/Sub-gejala Penelitian	86
Tabel III.2.	Jumlah BKM / KSM Lokasi Penelitian (Kecamatan)	87
Tabel IV.1.	Wilayah Pengembangan Kota Semarang	102
Tabel IV.2.	Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk	105
Tabel IV.3.	Rangking Penduduk Miskin Per Kecamatan	110
Tabel IV.4.	Rekapitulasi Data Warga Miskin Kota Semarang	112
Tabel IV.5.	Rumah Tangga Miskin 2006-2009 Kota Semarang	114
Tabel IV.6.	Mata Pencaharian Penduduk Kecamatan Semarang Barat	116
Tabel IV.7.	Jumlah Penduduk Miskin Kecamatan Semarang Barat ...	117
Tabel IV.8.	Mata Pencaharian Penduduk Kecamatan Tembalang	118
Tabel IV.9.	Jumlah Penduduk Miskin Kecamatan Tembalang	119
Tabel IV.10.	Prosentase Perkembangan BKM di seluruh Kecamatan ..	120
Tabel IV.11.	KSM Per Kecamatan	121
Tabel IV.12.	Rekapitulasi Kegiatan BKM Kelurahan Tandang	122
Tabel IV.13.	Rekapitulasi Kegiatan BKM Bojong Salaman	123
Tabel IV.14.	Rekapitulasi Warga Miskin Per Kecamatan	123
Tabel V.1.	Susunan Pengurus BKM Manunggal Sejahtera	176

Tabel V.2	Pertanggungjawaban Keuangan BKM Manunggal Sejahtera	180
Tabel V.3.	Pemanfaatan Dana BLM untuk KSM Produktif s/d 2013 ..	182
Tabel V.4.	Rencana Pendapatan dan Anggaran BKM Manunggal Sejahtera Tahun 2014	187
Tabel V.5.	Program Kerja BKM Manunggal Sejahtera Tahun 2014 ..	201
Tabel V.6.	Susunan Pengurus BKM Bojong Salaman	212
Tabel V.7.	Kegiatan BKM Bojong Salaman (sampai dengan 2013)...	218
Tabel V.8.	Program Kerja BKM Bojong Salaman.....	222
Tabel VI.1.	Tabel Bandingan Kelembagaan PNPM-MP Normatif, Existing, Usulan.....	307

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1.	Konsep Dasar Struktur Kelembagaan	55
Gambar II.2.	Kerangka Pikir Teori	83
Gambar III.1.	Komposisi dan Proses Analisis	94
Gambar III.2.	Kerangka Penelitian	99
Gambar IV.1.	Rumah Tangga Miskin/Sasaran Kota Semarang.....	113
Gambar IV.2.	Garis Kemiskinan Kota Semarang 2004-2009.....	115
Gambar IV.3.	Struktur Organisasi Pelaksana PNPM-MP	132
Gambar IV.4.	Siklus Kelembagaan PNPM-MP	141
Gambar IV.5.	Mekanisme Pelaksanaan Program	160
Gambar IV.6.	Existing Kelembagaan PNPM-MP di Kota Semarang..	163
Gambar V.1.	Struktur Organisasi BKM Manunggal Sejahtera	199
Gambar V.2.	Struktur Organisasi BKM Bojong Salaman	224
Gambar VI.1.	Siklus Kelembagaan PNPM-MP berdasarkan organisasi pelaksana PNPM-MP	314
Gambar VI.2.	Kondisi Existing Kelembagaan PNPM-MP pada tingkat Kelurahan.....	316
Gambar VI.3.	Usulan Model Kelembagaan PNPM-MP di Kota Semarang	318
Gambar VII.1.	Rekomendasi Usulan Model Kelembagaan PNPM-MP	323

GLOSSARY

- APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (dana untuk penyelenggaraan pemerintah kota selama satu tahun berdasarkan pendapatan dan pengeluaran daerah)
- APBN : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (dana untuk penyelenggaraan pemerintahan/Negara selama satu tahun berdasarkan pendapatan dan pengeluaran negara)
- Askot : Asisten Kota (tenaga professional program PNPM-MP di daerah yang bertugas membantu koordinator kota)
- Bapermas&KB : Badan Pemberdayaan Masyarakat (lembaga pemerintah kota sebagai leading sector yang menangani program pemberdayaan masyarakat, seperti PNPM-MP)
- Bappeda : Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Lembaga pemerintah kota yang menangani perencanaan pembangunan)
- Bappenas : Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (perencana pembangunan tingkat nasional)
- BKM : Badan Keswadayaan Masyarakat (lembaga masyarakat yang dibentuk PNPM-MP pada tingkat kelurahan)
- BLM : Bantuan Langsung Masyarakat (dana batuan sebagai stimulan dan intervensi program PNPM-MP)
- BLT : Bantuan Langsung Tunai (bantuan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat miskin akibat kebijakan pemerintah)

BOP	:	Beaya Operasional dan Pengendalian (beaya untuk operasional kegiatan program)
BPS	:	Badan Pusat Statistik (lembaga yang menyediakan data yang terkait dengan berbagai program)
BUMN	:	Badan Usaha Milik Negara (badan usaha milik Negara tetapi bersifat profit)
BWK	:	Badan Wilayah Kota (pembagian wilayah berdasarkan karakteristik tertentu)
CSR	:	<i>Corporate Social Responsibility</i> (kelompok masyarakat yang peduli pada masalah masyarakat)
DADPM	:	Daftar Alokasi Dana Pemberdayaan Masyarakat (Dana yang dialokasikan untuk membantu pemberdayaan masyarakat)
DDUB	:	Dana Daerah Untuk Urusan Bersama (Alokasi dana pemerintah daerah untuk program yang dibiayai APBN)
Departemen PU	:	Departemen Pekerjaan Umum (Kementerian yang diberi tugas menangani program PNPM)
DIPA	:	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Alokasi anggaran untuk program)
Ditjen PMD	:	Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa (Direktorat dalam Kementerian Dalam Negeri yang menangani pemberdayaan Masyarakat Desa)
DJCK	:	Direktorat Jenderal Cipta Karya (Direktorat dibawah Kementerian PU yang menangani program PNPM)
Faskel	:	Fasilitator Kelurahan (Tenaga profesional program PNPM yang dilatih untuk mendampingi masyarakat dalam mengelola PNPM-MP di kelurahan)
Gerdu Kempling	:	Gerakan Terpadu Kesehatan, Ekonomi, Pendidikan, Lingkungan (Program Pemkot Semarang untuk

		mengintegrasikan program kelembagaan PNPMP)
GNP	:	<i>Gross National Product</i> (Perhitungan pendapatan nasional secara kasar pertahun)
IDT	:	Inpres Daerah Tertinggal (Instruksi Presiden untuk penanganan daerah tertinggal dengan program tertentu)
IKU	:	Indikator Kinerja Utama (Ukuran kinerja sebuah program di masyarakat)
Inpres	:	Instruksi Presiden (Keputusan Presiden tentang berbagai program yang sifatnya mendesak)
JPS	:	Jaring Pengaman Sosial (Bantuan pemerintah untuk masyarakat miskin akibat krisis ekonomi)
Juklak	:	Petunjuk Pelaksanaan (Pedoman untuk melaksanakan kegiatan program di lapangan)
KBK	:	Komunitas Belajar Kelurahan (Forum yang dibentuk di tingkat kelurahan untuk mendiskusikan masalah kemiskinan di wilayah kelurahan)
KBP	:	Komunitas Belajar Perkotaan (Forum yang dibentuk di tingkat kota untuk mendiskusikan masalah kemiskinan di tingkat kota)
Keppres	:	Keputusan Presiden (Pedoman yang dikeluarkan Presiden untuk kegiatan program di lapangan)
Kelembagaan	:	Penggunaan kata kelembagaan dalam judul adalah Istilah yang lazim digunakan untuk menggantikan kata perlembagaan yang merupakan suratan prinsip azas undang-undang atau peraturan negeri sesebuah unit dengan sesebuah unit dasar yang memerintah negeri (Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka), Edisi Ketiga.

Kimpraswil	:	Permukiman dan Prasarana Wilayah (Lembaga yang menangani permukiman dan prasarana masyarakat)
KK	:	Kepala Keluarga (Orang yang bertanggung jawab terhadap kebutuhan keluarga dalam kehidupannya)
KMP	:	Konsultan Manajemen Pusat (Badan pada tingkat pusat yang mengelola program PNPM)
KMW	:	Konsultan Manajemen Wilayah (Badan yang berada pada tingkat wilayah untuk menangani program PNPM-MP)
Korkot	:	Koordinator Kota (Tenaga profesional yang ditunjuk dan dibina program PNPM untuk mengkoordinir kegiatan PNPM di daerah)
KPMD	:	Kader Pemberdayaan Masyarakat Daerah (Orang yang mau dan bersedia menjadi pelopor program pemberdayaan masyarakat)
KPMK	:	Kader Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (Orang diwilayah kelurahan yang bersedia menjadi penggerak pembangunan di kelurahan)
KSM	:	Kelompok Swadaya Masyarakat (Kelompok masyarakat miskin di tingkat basis yang di bentuk oleh BKM untuk melakukan kegiatan program dengan dana BLM)
KUR	:	Kredit Usaha Rakyat (Pinjaman dana untuk mengembangkan usaha masyarakat)
LPJ	:	Laporan Pertanggung jawaban (Pertanggung jawaban menggunakan dana untuk kegiatan tertentu)
LPMK	:	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (Lembaga yang dibentuk pemerintah kelurahan untuk tugas pemberdayaan masyarakat di kelurahan)

LSM	:	Lembaga Swadaya Masyarakat (Lembaga yang dibentuk masyarakat yang peduli pada masalah tertentu di masyarakat)
MCK	:	Mandi, Cuci, Kakus (fasilitas umum yang disediakan untuk kepentingan bersama)
Mendagri	:	Menteri Dalam Negeri (Kementerian yang menangani masalah yang terkait kepentingan umum masyarakat)
Menko Kesra	:	Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kementerian yang mengkoordinir kementerian lain dalam menangani kesejahteraan masyarakat)
Musrenbang	:	Musyawaharah Perencanaan Pembangunan (Forum untuk membahas rencana pembangunan yang melibatkan berbagai stakeholder)
NMC	:	National Management Consultant (Konsultan Manajemen Pusat/KMP)
P2DTK	:	Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (Program pembangunan pemerintah pusat untuk daerah yang dipandang tertinggal)
P2KP	:	Program Kelembagaan PNPM-MP Di Perkotaan (Program penanggulangan kemiskinan dengan karakteristik tertentu untuk masyarakat perkotaan)
Pamsimas	:	Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Program pemerintah untuk memenuhi kebutuhan air minum dan lingkungan)
Pddk	:	Penduduk (orang yang tinggal disuatu wilayah tertentu suatu Negara).
Pemda	:	Pemerintah Daerah (Lembaga pemerintah di tingkat daerah yang bertanggung jawab pada seluruh wilayahnya)

Perda	:	Peraturan Daerah (Peraturan yang dibuat Pemerintah Daerah untuk mengatur berbagai kegiatan pemerintahan di daerah)
Permendagri	:	Peraturan Menteri Dalam Negeri (Peraturan yang dikeluarkan kementerian untuk mengatur kegiatan pada tingkat nasional)
Perpres	:	Peraturan Presiden (Peraturan Kepala Negara/Kepala Pemerintahan sebagai pedoman bagi pejabat di bawahnya)
PIP	:	Pembangunan Infrastruktur Permukiman (Program yang menyediakan fasilitas permukiman bagi masyarakat)
PISEW/RISE	:	Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah/Rural Infrastructure for Social and Economic Activities
PJM	:	Perencanaan Jangka Menengah (Rencana pembangunan dalam kurun waktu 1-3 tahun)
PJM Pronangkis	:	Pembangunan Jangka Menengah Program Kelembagaan PNPM-MP (Program pembangunan yang disusun BKM melalui RWT dalam rencana 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun untuk wilayah kelurahan)
PJOK	:	Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (Pejabat tingkat kecamatan yang ditugasi tanggung jawab kegiatan PNPM-MP di kelurahan)
PPLPBK	:	Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas
PMU	:	Program Manajemen Unit (program pembangunan pada suatu unit kegiatan)
PNPM	:	Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (Program yang dirancang untuk kelembagaan

		PNPM-MP berbasis pemberdayaan dengan intervensi dana BLM)
PNPM-MP	:	Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (Program yang dirancang untuk kelembagaan PNPM-MP berbasis pemberdayaan dengan intervensi dana BLM untuk masyarakat perkotaan)
PNS	:	Pegawai Negeri Sipil (Aparat negara yang menjalankan tugas pelayanan umum pada masyarakat)
PODES	:	Potensi Desa (Kekuatan yang dimiliki desa berdasarkan sumberdaya manusia dan sumberdaya ekonomi)
Pokja	:	Kelompok Kerja (Kelompok peduli yang terlibat dalam program)
PPK	:	Program Pengembangan Kecamatan (Program pembangunan dengan basis kecamatan)
PPLS	:	Pendataan Program Layanan Sosial (Program pendataan warga terutama dari aspek ekonomi masyarakat)
PPM	:	Penanganan dan Pengaduan Masyarakat (Program yang dirancang untuk menerima pengaduan masyarakat atas program yang ada diwilayahnya)
PS	:	Pemetaan Swadaya (Siklus dalam PNPM-MP yang dapat menghasilkan daftar warga miskin-PS-2)
PTO	:	Petunjuk Teknis Operasional (Pedoman pelaksanaan kegiatan program di lapangan)
Renja	:	Rencana Kerja (Daftar kegiatan dalam kurun watu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun oleh program)
Renstra	:	Rencana Strategis (Sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan program di lapangan)

Renta	:	Rencana Tahunan (Daftar kegiatan program yang disusun per tahun)
RK	:	Refleksi Kemiskinan (Siklus PNPM-MP untuk memetakan kemiskinan di wilayah kelurahan)
RKM	:	Rembug Kesiapan Masyarakat (Forum pada tingkat kelurahan untuk mengambil keputusan yang terkait dengan program di kelurahan yang melibatkan masyarakat)
RPJM	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah
RPJMD	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJMN	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJP	:	Rencana Pembangunan Jangka Panjang
RPJPD	:	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
RPJPN	:	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
RT	:	Rukun Tetangga (Satuan lembaga unit terkecil dalam masyarakat)
RR	:	Repyment Rate (Tingkat Pengembalian) atas pinjaman KSM ke UPK (Unit Pengelola Keuangan)
RTM	:	Rumah Tangga Miskin (Keluarga yang masuk dalam daftar keluarga miskin-PS-2)
RTS	:	Rumah Tangga Sasaran (Keluarga miskin yang menjadi sasaran program untuk mendapat bantuan program)
RTSM	:	Rumah Tangga Sangat Miskin (Keluarga yang kesulitan memenuhi kebutuhan hidup minimal dan perlu bantuan orang lain)
RW	:	Rukun Warga (Satuan lembaga di masyarakat yang membantu kelurahan)
Sanimas	:	Sanitasi oleh Masyarakat (Kegiatan yang diinisiasi masyarakat untuk menjaga lingkungan)

Satker	:	Satuan Kerja (Unit kerja dalam program yang menjadi penghubung pemerintah dengan masyarakat)
Satker PIP	:	Satuan Kerja Pembangunan Infastruktur Permukiman
SDM	:	Sumber Daya Manusia (Potensi yang ada dalam diri seseorang)
SE Mendagri	:	Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Edaran kementerian sebagai petunjuk teknis operasional kegiatan)
SIMGAKIN	:	Sistem Informasi Manajemen Keluarga Miskin (Sebuah sistem yang menyajikan jumlah penduduk miskin di suatu wilayah)
SKPD	:	Satuan Kerja Perangkat Daerah (Satuan kerja yang dibentuk Kepada Daerah untuk menangani bidang kerja tertentu)
SNVT PBL Prop	:	Satuan Kerja Non Vertikal Penataan Bangunan dan Lingkungan Propinsi
SPADA	:	Support for Poor and Disadvantaged Areas
SPKD	:	Strategi Kelembagaan PNPM-MP Daerah (Strategi yang biasanya disusun Bappeda untuk kelembagaan PNPM-MP daerah)
SPP	:	Surat Permintaan Pembayaran (Perintah pembayaran kegiatan program dari Kas Negara)
TKPP	:	Tim Koordinasi Pengendali Program (Satuan tugas gabungan dari berbagai instansi untuk koordinasi program PNPM-MP)
TKPKD	:	Tim Koordinasi Kelembagaan PNPM-MP Daerah (Lembaga yang dibentuk daerah yang berfungsi koordinasi dan integrasi program kelembagaan PNPM-MP daerah)

TNP2K	:	Tim Nasional Percepatan Kelembagaan PNPM-MP (Lembaga tingkat pusat yang menangani kelembagaan PNPM-MP)
Toga	:	Tokoh Agama (Tokoh masyarakat yang terdiri dari tokoh berbagai agama)
Tomas	:	Tokoh Masyarakat (Tokoh atau orang yang berpengaruh di masyarakat dengan latar belakang jabatan, kekayaan, kepedulian, keteladanan sikap dll)
UEP	:	Usaha Ekonomi Produktif (usaha untuk mengembangkan ekonomi masyarakat)
UPK	:	Unit Pengelola Kegiatan (Unit yang berada dibawah kelembagaan program)
UMKM	:	Usaha Mikro Kecil dan Menengah (bentuk usaha yang dilakukan masyarakat dalam skala kecil)
UP	:	Unit Pengelola (unit yang dibentuk BKM untuk menangani KSM)
UPK	:	Unit Pengelolaan Keuangan (Unit dibawah BKM yang menangani KSM keuangan)
UPK-BKAK	:	Unit Pengelolaan Keuangan-Badan Kerjasama Antar Kampung (Badan yang dibentuk untuk melakukan kerjasama)
UPL	:	Unit Pengelola Lingkungan (unit dibawah BKM yang menangani KSM Lingkungan)
UPS	:	Unit Pengelola Sosial (unit dibawah BKM yang menangani KSM Sosial)
USK	:	Unit Satuan Kerja (Unit satuan tugas dalam program)
UU	:	Undang-Undang (Dasar hukum untuk pelaksanaan kegiatan)
WP	:	Wilayah Pengembangan (wilayah yang menjadi sasaran pengembangan program)

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Panduan Wawancara

Lampiran 2 : Desain Rancangan FGD

Lampiran 3 : Daftar Informan dan Transkrip Hasil Wawancara

Lampiran 4 : Daftar Kegiatan KSM

Lampiran 5 : Transkrip Hasil Focus Group Discussion (FGD),